

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amerika Serikat (selanjutnya akan disebut 'AS') adalah salah satu negara yang memiliki hubungan panjang secara historis dengan kawasan Timur Tengah. Hal ini dikarenakan pemerintahan AS menempatkan posisi Timur Tengah sebagai suatu kawasan yang sarat dengan berbagai kepentingan, mengingat terdapatnya berbagai isu yang bersinggungan langsung terhadap stabilitas kepentingan nasional AS di kawasan tersebut, kepentingan nasional yang dimaksud meliputi: Mengamankan akses minyak; Mencegah pengaruh Soviet dan Iran; Memastikan kelangsungan hidup dan keamanan sekutu Arab; Melawan terorisme; Mempromosikan demokrasi; Mengurangi arus pengungsi. Sembari menjalankan berbagai macam kepentingan nasional yang telah disebutkan, pemerintahan AS juga turut berusaha untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel (Athallah Al Sarhan, 2017).

Secara singkat, isu Palestina-Israel merupakan suatu konflik yang dipicu atas permasalahan sengketa tanah antara bangsa Zionis-Yahudi dan bangsa Arab-Palestina (Basyar, 2017). Faktanya, konflik Palestina-Israel telah berusia lebih dari tujuh dekade terhitung sejak tahun 1948 silam. Dengan kata lain, konflik antar kedua suku bangsa tersebut merupakan salah satu perselisihan terpanjang di dalam sejarah peradaban manusia yang masih berlangsung hingga dewasa ini.

Dapat dikatakan, posisi AS dalam menanggapi isu Palestina-Israel adalah selalu condong kepada kelompok Zionis, dalam hal ini ialah pemerintahan Israel. Terdapat berbagai faktor yang kerap menjelaskan keakraban antara kedua negara penganut paham demokrasi tersebut - salah satu faktornya ialah Israel merupakan ‘tangan kanan’ dan pelindung kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah sewaktu terjadinya Perang Dingin silam (Paat, 2013). AS memanfaatkan Israel sebagai benteng pertahanan atas pengaruh Uni Soviet di regional Timur Tengah, hal ini ditujukan guna mencegah efek domino pengaruh komunisme ke negara-negara Arab lainnya (Saputra, 2021).

Selain menjadi sekutu saat Perang Dingin silam, kedua negara memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan gaya hidup yang hampir serupa. Maka dari itu, pemerintahan AS adalah aktor yang berkomitmen untuk menempatkan Israel pada posisi istimewa – hal tersebut tercermin kedalam bentuk dukungan ekonomi, militer dan politik yang digelontarkan oleh pemerintah AS ke Israel. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *Congressional Research Service*, keseluruhan total kalkulasi sumber bantuan dana Israel dari AS berkisar lebih dari AS\$ 130 Miliar hingga tahun 2018, yang mana mayoritas merupakan sumbangan untuk keperluan militer (Sharp, 2020).

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, walaupun AS secara harfiah merupakan negara yang pro terhadap eksistensi Israel, namun terkait isu konflik Palestina-Israel, AS merupakan negara yang menginginkan Israel berdamai dengan negara tetangganya, Palestina. Dalam beberapa kesempatan, terlihat upaya pemerintah AS menjadi pihak juru penengah konvensi perdamaian antara Palestina

dan Israel, seperti yang dilakukan oleh Bill Clinton dalam menengahi kesepakatan Oslo – sebuah kesepakatan perdamaian yang pertama kali dalam sejarah turut melibatkan pihak Israel dan Palestina. Kesepakatan Oslo merupakan harapan dari cikal bakal terciptanya suatu kesepakatan perdamaian resolusi dua negara.

Di saat dunia internasional kerap menyanjung Bill Clinton sebagai sosok yang membuka harapan terciptanya perdamaian bagi konflik Palestina-Israel lantaran sukses sebagai pihak penengah di dalam kesepakatan Oslo, namun di lain sisi, pemerintahan Clinton dan Kongres AS mengeluarkan suatu produk Undang-Undang (UU) yang memiliki substansi untuk mengkhianati resolusi dua negara. UU tersebut bernama *'Jerusalem Embassy Act 1995'*, yang mana secara garis besar turut menginstruksikan pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem sekaligus turut mengakui kota Yerusalem sebagai ibu kota pemerintahan negara Israel.

Namun UU *Jerusalem Embassy Act 1995* tidak kunjung mendapat restu ratifikasi penandatanganan oleh Clinton dengan dalih menjaga stabilitas kepentingan keamanan nasional (Allam, 2019). Artinya, perpindahan Kedutaan Besar disertai pengakuan Yerusalem sebagai bagian dari ibu kota Israel dianggap belum resmi dan sah sebelum ditandatangani oleh individu yang menduduki jabatan sebagai Presiden AS.

Jika merujuk tindakan pemerintahan Clinton terhadap isu Palestina-Israel, hal tersebut menggambarkan 'cara Amerika' dalam menanggapi isu Palestina-Israel. Cara yang dimaksud yakni AS memainkan peran seperti sisi dua mata koin yang berbeda. Di satu sisi, turut memperjuangkan perdamaian antara Palestina-

Israel. Namun di sisi yang lain, berusaha menemukan solusi perdamaian yang berpihak menguntungkan faksi Israel (Robinson, 2021).

Selain disebabkan aspek kemiripan budaya, gaya hidup, dan sejarah sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor kelompok Yahudi AS merupakan suatu kunci alasan mengapa AS kerap kali mengakomodir kepentingan Israel. Walaupun tergolong sebagai masyarakat minoritas di tengah struktur kependudukan masyarakat sipil AS, namun entitas kelompok Yahudi AS memiliki suatu pengaruh daya tawar politik besar yang terorganisir di dalam AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*) - sebuah organisasi kelompok Yahudi AS yang beranggotakan para pendonor dana kampanye serta memiliki visi untuk mendorong kebijakan luar negeri Washington guna mengakomodasi kepentingan Tel Aviv (Sari, 2016). Oleh karena itu, isu Israel dan faktor suara Yahudi AS kerap kali menjadi perhatian utama bagi para kandidat Presiden AS guna mendapat simpati serta pengaruh dari AIPAC.

Entitas kelompok Yahudi AS bukan merupakan satu-satunya faktor paling berpengaruh yang menjadikan AS kerap mendukung kuat Israel walaupun dipengaruhi oleh kekuatan politik yang terhimpun di dalam AIPAC. Hal ini berangkat dari suatu pernyataan mantan Dubes Israel untuk AS, Ron Dermer, dirinya mengatakan bahwasannya pemerintahan Israel harus memprioritaskan hubungannya dengan kelompok Evangelis AS alih-alih Yahudi AS (Magid, 2021).

Kelompok Evangelis AS merupakan bagian dari kelompok penganut Kristen Protestan sekaligus salah satu komunitas umat Kristiani terbesar di antara penduduk AS. Secara teknis, Evangelis berkaitan dengan suatu individu, organisasi, atau gereja yang mewajibkan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan yang termaktub di dalam Al-Kitab, khususnya mengenai poin Yesus Kristus sebagai penyelamat dari umat manusia (Merritt, 2015b). Selain itu, mereka merupakan kelompok yang terkenal vokal mendukung Israel di tengah situasi konflik Palestina-Israel. Dukungan tersebut berangkat atas faktor ramalan Al-Kitab mengenai fenomena eskatologi *Jesus Second Coming*.

Gagasan dan prinsip-prinsip Kristen turut memberikan sumbangsih bagi dinamika haluan pembangunan bangsa AS, khususnya mempengaruhi nilai-nilai bidang pemerintahan serta sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian besar masyarakat AS merupakan warga yang datang dari Eropa serta menganut kepercayaan Kristiani (Edwards, 2015). Unsur-unsur Kristiani merupakan pembentuk gagasan “Konservatif” yang merupakan cikal bakal atas nilai-nilai yang diadopsi oleh *Grand Old Party* atau seringkali dikenal sebagai Partai Republik.

Presiden AS periode 2016-2021 merupakan figur yang berasal dari Partai berlambang gajah berwarna merah tersebut. Figur yang dimaksud yakni Donald John Trump, dirinya merupakan sosok Presiden yang kerap menuai kontroversi sepanjang masa kabinetnya. Bahkan kebijakannya mengenai isu Palestina-Israel tidak luput absen dari hal kontroversi yang meliputi: menunda bantuan dana untuk UNRWA (*The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in*

the Near East) (BBC Indonesia, 2019); tidak lagi menganggap pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat Palestina sebagai tindakan melanggar hukum internasional; Mengesahkan UU *Jerusalem Embassy Act* sebagai UU resmi.

Walaupun telah memporak-porandakan situasi konflik Palestina-Israel dengan membuat jenis kebijakan yang gegabah. Namun penulis melihat langkah kabinet Trump seakan mengikuti jejak pendahulunya, yakni dengan menjadi sosok yang berusaha mendamaikan konflik Palestina-Israel dengan ‘Cara Amerika’ yang mana artinya mendahulukan kepentingan Israel – kebijakan tersebut tertuang di dalam langkah *Deal of The Century* dan *Abraham Accord* (Musthafa Abd Rahman, 2020b).

Gencarnya upaya Trump dalam memberikan dukungan kepada Israel turut memberikan pertanyaan tersendiri pada benak penulis. Mengingat Trump merupakan sosok yang berasal dari partai Republik yang merupakan sebuah partai yang mengimplementasikan nilai-nilai konservatisme. Terdapat suatu fakta bahwasannya Trump memberikan tempat khusus bagi kelompok Evangelis untuk mempengaruhi kebijakannya di Gedung Putih dengan membuat suatu kelompok penasihat atas nama *Evangelical Advisory Board* (Boston, 2018). Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana kelompok Evangelis mempengaruhi kebijakan pemerintahan Trump dalam menangani perdamaian konflik Palestina-Israel.

Di tengah melakukan proses penelitian, penulis menemukan beberapa sumber penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai referensi lantaran pembahasannya yang mirip dengan isu yang sedang dikaji. Tulisan pertama ditulis

oleh Agra Haydar Allam yang bertajuk “Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Presiden Donald Trump Untuk Mengakui Status Kota Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel’.” - sesuai dengan judulnya, jurnal ini membahas mengenai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota dari Israel. Dengan menggunakan pendekatan Realisme-Neoklasik, tulisan ini memberikan kesimpulan bahwa tindakan Trump mengakui kedaulatan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dilatarbelakangi atas dukungan keadaan yang memungkinkan sekaligus sebagai upaya memenuhi janji kepada Rakyat AS sebagai konstituennya. Keadaan yang mendukung disebabkan atas dua faktor ; faktor eksternal berasal dari ancaman Iran kepada negara-negara Arab Teluk – sehingga menyebabkan keberpihakan negara Arab Teluk terhadap AS guna membendung ancaman Iran ; faktor internal berasal dari dukungan aktor domestik seperti kalangan Yahudi dan Evangelis.

Tulisan kedua ditulis oleh Anisah Amalia Soekarno yang bertajuk “*United State’s Unwavering Support In Israel: Biased Foreign Policy In Israel-Palestine Conflict (2016-2019)*’ - Jurnal ini menjelaskan alasan AS dibawah kepemimpinan Donald Trump yang melakukan kebijakan yang menguntungkan Israel di tengah isu Palestina-Israel. Di dalam bingkai neorealisme-klasik, terdapat dua faktor utama mengapa AS melakukan hal tersebut. Pertama, mengenai faktor eksternal, adanya faktor Iran yang menjadi ancaman bagi negara-negara sekutu AS di Timur Tengah yakni Israel dan negara Arab Teluk. Faktor Internal berasal dari tiga elemen yang berbeda yang meliputi *state structure*, *domestic group*, dan aktor elit yang berada di lingkungan Trump (Soekarno, 2019).

Tulisan ketiga ditulis oleh Motti Inbari dan M. Gordon Byrd yang bertajuk *'Why do Evangelicals support Israel?'* - Jurnal ini memberikan ulasan mengenai faktor kelompok Evangelis yang memberikan dukungan bagi pemangku kebijakan yang mengedepankan kepentingan penduduk Yahudi-Israel di dalam kancah perpolitikan luar negeri AS. Di dalam jurnal ini, disebutkan bahwa dukungan kelompok Evangelis (*White Evangelical Christian*) terhadap Yahudi-Israel berangkat atas faktor firman Al-Kitab mengenai peristiwa Kedatangan Yesus Kedua Kali di Yerusalem (Inbari et al., 2018).

Terakhir, penelitian sebelumnya terhadap kajian ini ditulis oleh Athallah S. Al Sarhan yang bertajuk *'United States Foreign Policy in the Middle East'* - Jurnal ini menerangkan sejarah perpolitikan luar negeri AS di area Timur Tengah dari masa Post-PD I sampai Pasca-PD II. Inti dari jurnal ini menerangkan bahwa Timur Tengah merupakan area yang menjadi perhatian sentral terhadap kebijakan luar negeri AS, salah satunya mengenai isu Palestina-Israel yang merupakan salah satu konflik terpanjang pasca PD II. Menurut poin tulisan ini, AS memiliki misi utama untuk melindungi kedaulatan Israel sebagai sekutu terkuat di Timur Tengah. Hal ini tentu saja dilandasi faktor kuatnya relasi antar kedua negara (Atallah Sarhan, 2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang diterangkan oleh penulis pada bagian latar belakang, maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dari suatu pertanyaan yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan penulisan. Pertanyaan tersebut yakni: “Bagaimana pengaruh kelompok Evangelis AS sebagai pemangku kepentingan

utama kebijakan luar negeri AS era Trump dalam memberikan keberpihakan dukungan terhadap Israel di tengah upaya perdamaian konflik Palestina-Israel?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan pengaruh kelompok Evangelis AS dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS periode Donald Trump atas keberpihakannya terhadap Israel di tengah upaya perdamaian konflik Palestina-Israel.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Tulisan ini menawarkan cara pandang alternatif mengenai perspektif pemerintahan AS era Trump saat menangani isu perdamaian konflik Palestina-Israel dalam kacamata teori Liberalisme Ideasional yang merupakan turunan atas paradigma Liberalisme. Sehingga pembaca diharapkan dapat mengetahui secara komperhensif pengaruh kelompok Evangelis AS dalam mendorong kebijakan Trump untuk melaksanakan kebijakan pro-Israel.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada masyarakat mengenai penjelasan kelompok Evangelis AS sebagai faktor komunitas domestik yang berpengaruh dalam membentuk kebijakan ‘pro-Israel’ era Trump di tengah upaya perdamaian konflik Palestina-Israel.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Liberalisme

1.5.1.1. Latar belakang

Pasca berakhirnya abad pertengahan (5 M-15 M) yang diidentikan dengan keadaan hidup masyarakat Eropa di bawah zaman kegelapan lantaran terdapatnya suatu kekuasaan berbasis agama yang mengekang, lahirlah suatu abad pencerahan/abad renaisans (14 M-17 M) yang ditandai dengan lahirnya sebuah fenomena kebebasan berpikir lebih terbuka secara intelektual. Kelahiran pokok pikiran liberalisme merupakan suatu bukti prodak yang dihasilkan oleh abad pencerahan dengan ciri khas ‘kebebasan berpikirnya’. Pada dasarnya, paradigma liberalisme merupakan suatu pokok pikiran yang mengupayakan terdapatnya suatu kebebasan individu dalam segala bidang kehidupan (Agung, 2016). Seiring berjalannya waktu, paradigma liberalisme turut beranjak menjadi suatu ideologi politik yang memiliki pengaruh besar di Eropa dan dunia.

Dalam bidang Hubungan Internasional, pengaruh liberalisme hadir pada saat berakhirnya Perang Dunia I. Hal ini berawal dari inisiatif presiden AS ke-28, Woodrow Wilson yang mengagagas pidato bertajuk “14 strategi menuju perdamaian dunia”. Salah satu gagasan Wilson adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, sebuah institusi internasional yang dibentuk guna menjamin kemerdekaan politik serta mengintegrasikan kepentingan antara negara besar dan negara kecil guna mencegah terjadinya suatu peperangan (Onion et al., 2022). Pada tanggal 10 Januari 1920, Liga Bangsa-Bangsa resmi dibentuk dengan beranggotakan 60 negara berdaulat.

1.5.1.2. Akar pemikiran terdahulu

Terdapat beberapa tokoh liberalisme klasik yang memiliki sumbangsih terhadap akar pemikiran paradigma liberalisme, diantaranya adalah John Locke (1632-1704 M), Adam Smith (1723-1790 M), Immanuel Kant (1724 -1804 M). Liberalisme klasik merupakan suatu teori yang mengadopsi pendekatan “mengusung dari bawah”/*bottom up*, sebuah pendekatan Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas politik internasional berawal dari unsur-unsur domestik dengan menekankan “perspektif dari dalam negeri yang di manifestasikan ke luar batas-batas wilayah”/*inside looking out* (Haar, 2009).

i. John Locke

Dalam tulisannya yang bertajuk *‘two treatises of government’*, menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang hakikatnya ditakdirkan setara dan bebas. Hal ini dikarenakan bahwa manusia diberikan akal pikiran oleh Tuhan sehingga dapat memilih suatu hal yang baik dan buruk oleh kehendaknya. Menurut Locke, terdapat setidaknya tiga hak yang tidak boleh dicabut dari manusia dalam menjalankan hidupnya, yakni hak untuk memiliki; hak untuk bebas; dan hak untuk hidup. Berangkat dari perhatiannya yang tinggi atas nilai kemanusiaan, Locke menggagas konsep ‘Kontrak Sosial’, suatu pemahaman konsep yang menggambarkan fungsi diciptakannya negara sebagai pengakomodir hak-hak dasar manusia (Gabriel, 1994).

ii. Adam Smith

Smith menyatakan bahwa negara tidak boleh mengintervensi kepada masyarakat yang sedang mengejar kepentingannya masing-masing guna mencapai suatu keadaan *harmony of interest* – artinya, jika manusia dibiarkan mengejar kepentingannya tanpa campur tangan negara, maka akan menciptakan masyarakat yang harmonis (Rosyidin, 2020).

iii. Immanuel Kant

Kant turut menyumbangkan pemikiran mengenai konsep ‘Perdamaian abadi’ melalui tulisannya yang bertajuk *Towards Perpetual Peace*, sebuah konsep yang menawarkan tatanan dunia berdasarkan konstitusi republik, prinsip federalisme, dan prinsip keramahtamahan universal. Menurut Kant, ketiga prinsip tersebut merupakan kunci yang saling berkaitan antara satu sama lainnya dalam menciptakan perdamaian abadi, yang meliputi:

- a. *Konstitusi Republik*, negara yang berbentuk Republik akan cenderung sulit untuk berperang lantaran menganut prinsip demokrasi yang turut melibatkan restu warga negara dalam keberlangsungannya, sehingga kemungkinan kecil untuk berperang lantaran lebih banyaknya risiko yang tidak menguntungkan
- b. *Prinsip federalisme*, gagasan atas mendirikan prinsip federasi antara negara-negara merdeka dengan mengadopsi hukum internasional kedalam wujud lembaga suprasional guna mencegah terjadinya peperangan antar-negara;
- c. *Prinsip keramahtamahan universal*, prinsip tersebut mengedepankan nilai toleransi dan kesetaraan antar-individu di seluruh tempat. Dengan kata lain,

seluruh individu di muka bumi tidak boleh merasa paling berkuasa atas pihak lainnya lantaran saling memiliki hak yang sama (Rosyidin, 2020).

1.5.1.3. Asumsi-asumsi dasar

Dalam buku sosok penganut Realis ternama asal Britania Raya, Edward Hallett Carr yang bertajuk '*The Twenty Years Crisis 1919-1939*', turut membahas mengenai perdebatan besar pertama antara realisme dan liberalisme (idealisme) – suatu perdebatan yang turut berkontribusi pada perkembangan studi Hubungan Internasional. Dalam perdebatan besar pertama, realisme menganggap bahwa liberalisme merupakan suatu gagasan yang bersifat utopianisme lantaran lebih mengedepankan 'khayalan' disamping 'realita' yang ada (Carr, 2016). Pendek kata, perdebatan besar pertama berangkat dari perbedaan perspektif antara kaum realis dan kaum liberalis yang kontradiktif.

Kaum liberal memandang optimis konsep perdamaian melalui mekanisme kerja sama antar negara dalam konteks hubungan internasional. Menurut Carr, pandangan optimis kaum liberal atas kerja sama antar negara disebabkan oleh kepercayaannya yang tinggi terhadap pemberlakuan kaidah moralitas universal individu kepada negara di tengah praktik politik internasional (Carr, 2016). Dengan kata lain, kaum liberalis memandang bahwa kerja sama antar negara di tengah politik internasional merupakan cerminan atas hubungan antar individu yang memberlakukan standar nilai perilaku politik yang baik. Sedangkan bagi kaum realis, moralitas individu merupakan suatu hal yang tidak dapat diterapkan kepada negara di tengah praktik politik internasional. Kaum realis menganggap tidak ada otoritas di atas negara dapat memaksakan keputusannya terhadap negara – yang

mana kondisi tersebut kerap dikenal dengan konsep 'Anarki'. Terdapatnya pemahaman anarki oleh kalangan realis menyebabkan setiap negara bergerak atas dorongan kepentingan nasionalnya masing-masing tanpa mengindahkan prinsip moralitas individu lantaran tidak bisa dipaksakan (Carr, 2016).

Secara garis besar, perdebatan besar pertama dalam dunia hubungan internasional mengangkat isu kaum realis menuding paradigma liberalis sebagai sesuatu perspektif yang utopis. Hal ini berangkat atas pandangan realis yang menyatakan bahwa politik internasional merupakan ajang perebutan kekuasaan sehingga sulit untuk mencapai sebuah perdamaian. Sebaliknya, liberalisme memandang bahwa politik internasional berpotensi besar menciptakan sebuah perdamaian melalui kerja sama antar negara.

Dalam Rosyidin (2020), terdapat sejumlah asumsi-asumsi dasar paradigma liberalisme yang dirangkum ke dalam tiga bagian, yakni:

a. **Aktor**

Paradigma liberalisme memandang bahwa negara bukanlah aktor utama di balik politik internasional, alih-alih lebih memprioritaskan peran individu dan kelompok. Individu dan kelompok merupakan aspek penting dalam paradigma liberalisme, hal ini dikarenakan paradigma tersebut mengadopsi pendekatan *bottom up* – pendekatan yang mengusung dari tingkat individu, berkembang ke tingkat negara, hingga ke skala internasional (Cynthia Weber, 2005). Dengan kata lain, paradigma liberalisme memandang bahwa unit yang memegang peranan penting dalam menjalankan kebijakan negara di tengah politik internasional adalah

sekumpulan individu. Sehingga dalam logika paradigma liberalisme, negara merupakan realitas yang merepresentasikan kepentingan suatu kelompok individu dalam ranah kebijakan luar negeri.

Selain mengadopsi pendekatan *bottom up*, pendekatan liberalisme turut menyerap pendekatan *inside looking out* yang mengandalkan politik domestik sebagai modal dasar dalam ajang politik internasional dalam konteks pemenuhan wujud kepentingan nasional. Oleh karena itu, liberalisme mengutamakan faktor-faktor domestik sebagai wujud determinan dalam politik internasional.

b. Hakikat Kepentingan Nasional

Bagi paradigma liberalisme, kepentingan nasional suatu negara merupakan cerminan atas kepentingan domestik yang dilayangkan oleh kelompok individu. Dalam konteks memperoleh tujuan dalam politik internasional, kaum liberalis lebih memilih menggunakan frasa ‘preferensi negara’ alih-alih ‘kepentingan nasional’. Hal tersebut dikarenakan tindakan negara dalam politik internasional harus mendasar pada tujuan segenap kelompok individu pada ranah domestik.

Dalam kacamata kaum liberalis, preferensi negara memiliki peran untuk menjadi suatu ‘buku panduan’ perilaku suatu negara dalam konteks kooperasi, kebijakan luar negeri, maupun konflik (Moravcsik, 2010). Preferensi negara dibentuk dan ditentukan oleh para aktor-aktor domestik. Relasi antara kelompok individu domestik dan negara diibaratkan dengan fungsi sabuk transmisi, yang mana kelompok individu domestik menyalurkan kepentingannya kepada negara sehingga negara memiliki tugas untuk merealisasikan kepentingan tersebut hingga

tercapai secara praktis dan konstruktif (Rosyidin, 2020). Oleh karena itu, negara merupakan entitas pencapai tujuan bagi kelompok domestik tertentu.

c. **Hakikat Struktur Internasional**

Paradigma liberalisme melihat hakikat struktur internasional adalah sesuatu yang bekerja dengan mengedepankan faktor kolaboratif. Artinya, hubungan interaksi antar negara saling mengedepankan unsur-unsur kerja sama. Keoptimisan kaum liberalis terhadap kolaborasi antar negara yang merupakan wujud atas manifestasi kerja sama antar individu lahir atas preskripsi bahwasannya manusia memiliki sifat alamiah yang baik sehingga memiliki kemampuan untuk bekerjasama dan berbagi antara satu sama lainnya (Kegley & Wittkopf, 1997). Walaupun membawa tema ‘Kerjasama’, tidak serta merta kaum Liberalis mengedepankan nilai ‘Altruisme’ lantaran tetap berpegang teguh terhadap pencapaian tujuan preferensi negaranya masing-masing. Bagi kaum Liberalis, kerja sama merupakan kunci dari sebuah perdamaian lantaran akan menciptakan suatu hubungan yang *positive sum game* (menang-menang).

1.5.1.4. Pendekatan Domestik dalam Hubungan Internasional

Pada tulisan ini, penulis mengadopsi landasan teori liberalisme ideasional dalam menganalisa sekaligus menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah. Sejatinya, teori liberalisme ideasional merupakan salah satu turunan dari aliran paradigma liberalisme dalam studi Hubungan Internasional. Menurut Prof. Andrew Moravcsik, liberalisme ideasional berasumsi bahwa faktor pembentuk preferensi suatu negara berangkat dari identitas serta nilai domestik yang kemudian diusahakan agar tersalur ke dalam ranah politik internasional (Moravcsik, 2014).

Sejalan dengan konteks kebijakan luar negeri, maka liberalisme ideasional berpandangan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara diharuskan untuk selaras dengan preferensi negara yang mana dibentuk berdasarkan atas dasar spektrum identitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam ranah domestik. Bagi liberalisme ideasional, nilai-nilai sosial dan identitas merupakan seperangkat yang inheren terhadap konteks pembentukan preferensi individu dan kelompok dalam suatu masyarakat negara – yang mana hasil terhadap preferensi tersebut berupa pengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang dipercayakan melalui tatanan institusi domestik yang diakui, dalam hal ini adalah pemerintah (Moravcsik, 2010). Oleh karena itu, liberalisme ideasional berasumsi bahwa para kelompok domestik sejatinya akan senang apabila preferensinya di akomodir oleh pemerintah, sebagai timbal baliknya, kelompok domestik tersebut akan mendukung pemerintahan berdasarkan varian identitas dan nilai-nilai sosial yang direpresentasikan.

Berbicara mengenai unsur domestik dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri, James Fearon dalam tulisannya yang bertajuk '*Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations*' turut berusaha menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan kelanjutan atas perpolitikan ranah domestik suatu negara (Fearon, 1998). C.C. Rodee mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai suatu penerapan atas sekelompok prinsip dan pola perilaku yang telah ditetapkan oleh negara dalam melaksanakan hubungan dan negoisasi dengan negara lainnya yang ditujukan guna melindungi kepentingan utama negara tersebut. Namun pada praktiknya, kebijakan luar negeri yang melibatkan sekelompok prinsip dan pola

perilaku tidak dapat dipisahkan terhadap konteks politik domestik yang dijelaskannya pada pendekatan politik domestik.

Dalam salah satu sedarinya, akademisi Robert Glover menyatakan bahwa pendekatan politik domestik dalam studi Hubungan Internasional dianalogikan seperti melakukan proses *zoom in* sebuah gambar di gawai (Glover, 2018). Hal ini dikarenakan pendekatan domestik ditujukan guna menginterpretasi serta memahami lebih dalam mengenai kepentingan nasional sebuah negara, yang mana jika ditelusuri lebih dalam tentu saja dijelaskan pada spektrum faktor-faktor domestik. Lebih lanjut, Glover mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan bagaimana masyarakat di ranah domestik termotivasi dalam konteks mempengaruhi kebijakan luar negeri, di antaranya yakni faktor ideologi, institusi politik, kelompok kepentingan, opini publik, dan media.

Jika ditelusuri lebih dalam, tentu saja bahwa pendekatan domestik yang mengutamakan spektrum entitas domestik dalam menjelaskan kebijakan luar negeri berbeda dengan pendekatan sistemik versi Kenneth Waltz. Pendekatan sistemik melihat bahwa negara merupakan satu-satunya aktor dalam konteks politik internasional (Fearon, 1998), sehingga selalu mempertimbangkan spektrum perilaku negara-negara lainnya sebagai suatu hubungan yang saling mempengaruhi sebelum memutuskan kebijakan tertentu. Pendek kata, pendekatan sistemik mengadopsi pendekatan *outside looking in*, sedangkan pendekatan domestik bersifat *inside looking out*.

Atas dasar hal-hal yang telah disebutkan, penulis merasa teori liberalisme ideasional yang merupakan turunan paradigma liberalisme serta pendekatan domestik dalam studi Hubungan Internasional merupakan pisau analisa yang relevan dalam mengkaji bagaimana pengaruh dari kelompok Evangelis dalam kebijakan luar negeri AS era Trump pada konteks keberpihakannya terhadap Israel di tengah upaya perdamaian konflik Palestina-Israel. Hal tersebut dikarenakan bahwa latar belakang atas dikeluarkannya kebijakan 'pro-Israel' berangkat dari faktor domestik AS khususnya pada spektrum kelompok kepentingan berbasis identitas, kelompok Evangelis AS.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konsep

1.6.1.1. Kebijakan Luar Negeri

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri memiliki makna yang bermacam-macam. C.C. Rodee mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai suatu penerapan atas sekelompok prinsip dan pola perilaku yang telah ditetapkan oleh negara dalam melaksanakan hubungan dan negoisasi dengan negara lainnya yang ditujukan guna melindungi kepentingan utama negara tersebut (Nafisa, 2017). Definisi lainnya berasal dari Josep Frankel, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan dan tindakan yang melibatkan interaksi antara dua atau lebih antara negara-negara. Berdasarkan definisi tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa konsep kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi dan prinsip yang diadopsi oleh suatu negara dalam berinteraksi kepada negara lainnya yang ditujukan guna melindungi kepentingan nasional.

1.6.1.2. Politik Domestik

Robert Glover menyatakan bahwa politik domestik merupakan salah satu unsur kebijakan luar negeri yang menjelaskan sebab terciptanya kepentingan nasional suatu negara berdasarkan unsur-unsur yang terdapat didalam suatu negara. Lebih lanjut, Glover mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan bagaimana masyarakat di ranah domestik termotivasi dalam konteks mempengaruhi kebijakan luar negeri, di antaranya yakni faktor ideologi, institusi politik, kelompok kepentingan, opini publik, dan media (Glover, 2018).

1.6.1.3. Perdamaian

Menilik dari pemikiran Johan Galtung dan Charles Weber dari bukunya bertajuk '*Handbook of Peace and Conflict Studies*', mereka mendefinisikan perdamaian sebagai kondisi yang berkaitan dengan hal-hal 'kebahagiaan', 'harmonitas', 'kasih sayang', dan 'kebebasan' (Charles Weber, 2007). Galtung mengemukakan bahwa definisi perdamaian dalam arti positif akan terjadi apabila tidak adanya kekerasan bersifat langsung (*direct violence*), kekerasan bersifat struktural (*structural violence*), dan kekerasan bersifat budaya (*cultural violence*) yang berlangsung di tengah tatanan masyarakat. Sebaliknya, kekerasan dalam arti negatif hanya akan terjadi apabila individu tidak menerapkan kekerasan bersifat langsung – atau dalam bahasa Galtung, ia lebih senang menyebut dengan istilah '*absence of war*'.

1.6.1.4. Manifestasi

Merujuk KBBI, Manifestasi merupakan suatu bentuk realisasi atas sesuatu yang bersifat non-material atau tidak kasat mata (KBBI, n.d.).

1.6.1.5. Kelompok Evangelis

Kelompok Evangelis ditujukan kepada sebagian kalangan individu yang menganut kepercayaan agama Kristen Protestan. Dalam bahasa Inggris, kelompok Evangelis kerap disebut sebagai ‘*Evangelical Christian*’ – yang mana kata ‘*Evangelical*’ diadopsi dari kata ‘*Eungalion*’ yang berarti ‘Kabar Baik’ dalam bahasa Yunani. Sehingga pada definisi dasarnya, kelompok Evangelis mengacu pada kalangan individu, komunitas, atau gereja (denominasi) yang memiliki komitmen tinggi kepada substansi kabar baik di Al-Kitab bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat umat manusia (Merritt, 2015a).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Kebijakan Luar Negeri

Penelitian ini mengkaji perihal pengaruh kelompok Evangelis yang menyebabkan rilisnya kebijakan luar negeri AS yang pro-Israel era Kepresidenan Donald Trump di tengah upaya perdamaian konflik Palestina-Israel. Hal ini dapat dilihat dari dua luaran kebijakan luar negeri Trump, yakni *Deal of The Century* dan *Abraham Accord*. *Deal of The Century* merupakan sebuah proposal perdamaian yang dirilis pada awal tahun 2020, yang mana keseluruhan substansinya lebih menguntungkan Israel alih-alih Palestina. *Abraham Accord* merupakan sebuah upaya AS dalam menormalisasikan hubungan negara-negara Arab dengan Israel yang mana hal tersebut berdampak pada semakin ditinggalkannya Palestina dengan para sekutunya.

1.6.2.2. Perdamaian

Pada tulisan ini, penulis menggunakan istilah perdamaian negatif atau *negative peace* ala Johan Galtung yang secara sederhana didefinisikan sebagai suatu keadaan yang tidak ada peperangan secara langsung (*absence of war*). Hal ini dikarenakan tujuan utama dari upaya perdamaian konflik Palestina-Israel yang disalurkan melalui kebijakan luar negeri AS merupakan berhentinya perang antara kedua negara tersebut.

1.6.2.3. Kelompok Evangelis

Di Amerika, definisi ‘kelompok Evangelis’ terbagi menjadi dua makna. Makna pertama berkaitan dengan teologi, mengacu pada individu Kristiani yang menjalankan agamanya dengan saksama beserta dengan mengadopsi ajaran-ajaran Al-Kitab kedalam kehidupan bermasyarakat. Mereka berasal dari berbagai kalangan latar belakang, ras, suku, dan antar golongan. Makna kedua erat kaitannya dengan aspek politik, karakteristiknya sama persis dengan makna teologi hanya saja lingkupnya di dominasi pada kalangan kulit putih, berkarakter konservatif, dan mayoritas berafiliasi terhadap partai politik Republik. Kalangan ini kerap disebut sebagai *White Evangelical Christian*. Agar tidak terjadinya kerancuan, maka makna ‘kelompok Evangelis’ dalam keseluruhan tulisan ini ditujukan pada kalangan *White Evangelical Christian*.

1.6.2.4. Manifestasi

Sesuai dengan definisinya, manifestasi berarti merealisasikan sesuatu yang tidak berwujud. Konteks manifestasi dalam tulisan ini dimaksudkan kepada diskursus kebijakan luar negeri pro-Israel era Presiden Trump yang merupakan

sebuah langkah guna mewujudkan kepercayaan kelompok Evangelis perihal fenomena *Jesus Second Coming*.

1.6.2.5. Politik Domestik

Penulis mengadopsi salah satu instrumen dari politik domestik yang menghasilkan kebijakan luar negeri, yakni kelompok kepentingan. Dalam hal ini, kelompok kepentingan yang dimaksud adalah kelompok Evangelis sebagai salah satu instrumen politik domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

1.7. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang masalah serta pertanyaan yang tertera di rumusan masalah, tulisan ini memberikan hipotesis bahwa pengaruh kelompok Evangelis AS terhadap kebijakan luar negeri Trump dalam konteks upaya perdamaian konflik Palestina-Israel yakni kuat. Kelompok Evangelis AS adalah golongan yang memiliki identitas sebagai warga Kristen Protestan sekaligus salah satu penduduk mayoritas di dalam struktur kependudukan sipil AS. Mereka adalah kalangan yang kerap kali berusaha untuk melindungi kepentingan umat Yahudi di tanah Israel lantaran hal tersebut dianggap sesuai dengan pemenuhan ramalan Al-Kitab menyangkut fenomena *Jesus Second Coming* yang berada tepat di kota Yerusalem. Maka dari itu, kebijakan pro-Israel di tengah upaya perdamaian konflik Palestina-Israel merupakan bentuk upaya Trump dalam merebut dukungan dan suara kelompok Evangelis terhadap pemerintahannya – sedangkan, kelompok Evangelis bergantung kepada Trump

guna mengakomodir Yahudi-Israel dengan menggunakan pengaruhnya dalam memberikan masukan-masukan kebijakan luar negerinya.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis akan mengadopsi pendekatan metode kualitatif dalam melakukan penelitian guna menjawab permasalahan studi kasus yang telah tertera di dalam rumusan masalah. Pada dasarnya, penelitian kualitatif adalah metode yang memiliki tujuan guna menginterpretasikan suatu fenomena sosial dari pelbagai data yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Sehingga nantinya, berbagai macam data tersebut dikaji dengan berbasis pada teknik analisis mendalam (*indepth analysis*) dalam bentuk narasi yang substansinya memiliki tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan mengungkapkan terhadap suatu fenomena yang diteliti (Suyoto, 2015).

Sederhananya, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan jenis data yang berupa tertulis dan kata-kata dari sumber premier ataupun sekunder yang dimulai dari suatu asumsi peneliti yang kemudian dikembangkan dalam bentuk narasi melalui serangkaian tafsiran peneliti di dalam riset (Anwar, 2020).

1.8.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif dalam menjawab keseluruhan permasalahan yang tertera pada rumusan masalah. Tipe penelitian eksplanatif memiliki tujuan untuk membangun suatu teori melalui isu yang dikaji selama penelitian berlangsung dengan berbasis pada pola sebab-akibat.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis sumber-sumber data yang terdiri dari data sekunder. Data sekunder akan berasal dari buku-buku, artikel daring, surat kabar harian, internet, jurnal, skripsi, media audio, dan media visual, dan studi literatur.

1.8.4. Analisis Data

Mengacu pada tulisan Miles dan Huberman (1992), bahwa analisis data pada penelitian kualitatif digambarkan sebagai proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

i. Proses pengumpulan data merupakan proses yang melibatkan peneliti dalam menggali data sedalam-dalamnya. Metode pengumpulan data seringkali dilakukan dengan cara studi literatur dan observasi. Terdapat dua sumber utama data pada metode kualitatif, yakni tindakan dan kata-kata. Selain dari itu, tergolong kedalam data penunjang seperti sumber data tertulis, foto, dokumen, video, dan sebagainya (Moleong, 2000).

ii. Reduksi Data merupakan metode pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data-data mentah yang berasal dari proses

pengumpulan data di lapangan. Pendek kata, reduksi data adalah kegiatan pemilahan data mentah yang dielaborasi ke dalam kategorisasi sesuai kebutuhan penelitian.

iii. Penyajian data merupakan aktivitas menyusun data ke dalam informasi yang memungkinkan untuk diambilnya sebuah kesimpulan penelitian.

iv. Penarikan Kesimpulan merupakan proses tahap akhir dalam melakukan metode penelitian. Pada bagian ini, peneliti menuliskan garis besar informasi-informasi penting terhadap kajian yang diteliti.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Penulis akan menjelaskan latar belakang, menjabarkan rumusan masalah, serta hipotesis. Selain itu, penulis menjabarkan tujuan & manfaat penulisan, kerangka teori yang akan dijadikan pisau Analisa, dan operasionalisasi konsep, tinjauan Pustaka pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terakhir, penulis menjabarkan Metode dan sumber penelitian.

BAB II Gambaran Umum : Pada bagian ini penulis akan menuliskan: Latar belakang hubungan Israel-AS; Upaya pemerintahan AS dalam mendamaikan Palestina-Israel era sebelum kepresidenan Trump; Menuliskan mengenai profil kelompok Evangelis AS; Menerangkan penjelasan mengenai luaran produk kebijakan luar negeri AS era Trump dalam mendamaikan Palestina Israel (*Deal of the Century & Abraham Accord*).

BAB III Analisis Penelitian : Dalam bab ini, penulis akan mencoba membuktikan hipotesa berdasarkan rumusan masalah dengan menggunakan landasan teori Liberalisme Ideasional sebagai pisau Analisa. Temuan penulis akan dijabarkan berkaitan dengan bukti-bukti Kebijakan Luar Negeri Tump yang Pro-Israel di tengah upaya perdamaian konflik Palestina-Israel merupakan dorongan dari kelompok Evangelis Amerika - yang berangkat atas isu Fenomena *Jesus Second Coming*.

BAB IV Kesimpulan : Pada bagian ini, penulis menulis simpulan temuan hasil penelitian dan memberikan saran terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.